BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah di Indonesia saat ini dimulai dari pemerintahan desa. Desa merupakan wilayah tempat tinggal yang jumlah penduduknya sedikit, wilayah yang kecil dan struktur pemerintahan paling rendah tetapi mempunyai otonomi yang besar, luas dan desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai salah satu sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota. Desa menjadi tempat untuk mengaktualisasikan kepentingannya untuk menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Pemerintah Kabupaten atau kota memberikan kewenangan ke desa untuk membangun desanya sendiri sesuai dengan potensi desa masing-masing karena Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 desa di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis yaitu desa adat dan desa yang berkedudukan di kabupaten atau kota.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah yang memiliki hak otoritas, kedaulatan dan administratif desa. Undang-undang ini yang telah direvisi sebanyak 4 kali yaitu *pertama,* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Praja Desa, *kedua* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan desa, *ketiga* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan Perturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005) yang di mana hasil akhirnya desa dikembalikan kedaulatannya secara utuh karena desa sudah lebih dulu ada sejak masyarakat belum mengenal hukum secara tertulis (masih adat istiadat) sehingga jika diseragamkan maka tidak cocok dengan desa tersebut karena tidak sesuai dengan yang ada. Kelebihan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa mempunyai alokasi dana sendiri untuk peningkatan pembangunan, kinerja aparaturnya dan program-program untuk warga desa. Adapun struktur pemerintahan desa terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Menurut Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pelaksana tugas pemerintah dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan yang lain. Kepala desa dipilih berdasarkan suara terbanyak dari pemilu raya yang dilaksanakan oleh desa di tingkat desa dan memegang peran sebagai wakil dari rakyat di desa tersebut. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peranan kepala desa selaku menjadi pemimpin di desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa, keberhasilan pelaksanaan tugas perangkat desa, keberhasilan program yang ditawarkan dari kepala desa ke masyarakat. Figur sebagai kepala desa sangat dicontoh dimulai dari pola pikir, kinerja pekerjaan, cara menanggapi dan membuat keputusan kepada masyarakat.

Menurut Silambi (2014) kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tingkat organisasi pemerintahan terkecil di dalam wilayah

Indonesia, yakni pemerintahan desa sebagai suatu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu contoh kepala desa perempuan di Indonesia yang bernama Ibu Asnaini, dia kepala desa (Reje) Pegasing perempuan pertama di Tanah Gayo Banda Aceh. Beliau dinobatkan sebagai tokoh perempuan paling berpengaruh di Aceh oleh Gerakan Perempuan Aceh sehingga mendapatkan Anugerah Perempuan Aceh *Awards* (PAA) tahun 2012 (okezone.com, 2012).

Menurut Listiyaningsih (2010) kaum perempuan di Indonesia sering mengalami diskriminasi baik pekerjaan maupun permasalahan publik, bahwasanya perempuan tidak pantas mendapatkan jabatan tinggi dalam pemerintahan karena perempuan terlalu perasa dan mudah tersinggung atau emosional dalam memimpin atau mendapatkan jabatan tinggi sehingga ketika dalam memimpin kurang bisa membina anak buah dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan.

Menurut Listiyanigsih (2010) Di Indonesia juga ada tantangan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan yaitu adanya budaya patriarki karena di ranah pemerintahan maupun politik kepunyaan laki-laki. Di dalam dunia politik, perempuan sering dijadikan pelengkap saja, karena saat rapat situasi terasa maskulin dengan humor khas laki-laki yang mengekspos seksualitas, lama-lama perempuan merasa tidak nyaman dan tidak betah dengan forum tersebut.

Perempuan adalah bagian dari warga negara yang selama ini mengalami diskriminasi sehingga untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dibutuhkan perlakuan khusus atau kebijakan affirmasi. Pentingnya

keterwakilan perempuan secara proporsional tidak semata-mata untuk merepresentasikan proporsionalitas jumlah penduduk perempuan Indonesia, tetapi untuk bentuk pengakuan dan kesempatan yang sama atas harkat dan martabat perempuan sebagai warga negara yang diperlakukan sama dengan warga negara laki-laki oleh bangsa Indonesia.

Berhasilnya satu organisasi bergantung kepada pemimpin dengan bagaimana caranya menjalankan fungsinya secara efektif. Diharapkan dengan adanya pemimpin perempuan dapat membawa organisasi menjadi lebih baik dan mencapai tujuan beserta visi dan misinya tanpa adanya penglihatan bahwa perempuan tidak dapat memimpin suatu organisasi.

Salah satu hal menarik mengapa penelitian ini dilakukan di desa Selomartani adalah Desa Selomartani merupakan salah satu dari desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan dari 34 kepala desa yang dilantik untuk periode 2015-2021 (slemankab.go.id), 3 diantaranya perempuan. Kepala desa Selomartani yaitu Ibu Nur Widayati SH. Faktor empiriknya adalah Ibu Nur menjabat sebagai kepala Desa Selomartani selama 3 Periode dengan sekarang, yaitu periode 2004-2009, 2009-2015, dan 2015-2021.

Berdasarkan latar belakang inilah, muncul sebuah gagasan untuk meneliti tentang Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Tahun 2015-2018.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas disimpulkan bahwa rumusan masalah yaitu *Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Selomartani, Kalasan, Sleman Tahun 2015-2018.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan skripsi penulis adalah untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2018.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu:

   a. Manfaat Teoritis

      Manfaat teoritis skripsi Ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan.

   b. Manfaat Praktis

      Manfaat Praktis skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti yang ditemukan di lapangan berupa fakta-fakta untuk membantu penyajian analisis. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bangku perkuliahan dan mata kuliah *Leadership*.

D. Kajian Pustaka

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai landasan pemikiran, yang mana kajian pustaka yang peneliti gunakan adalah kajian pustaka bersumber dari beberapa jurnal dan skripsi sebelumnya yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ditaria (2016)	Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016	Hasil penelitian tersebut bahwa peran kepemimpinan perempuan di dinas tersebut telah melaksanakan peran-peran kepemimpinan dengan baik. Selain itu penerimaan dari anggota maupun staff yang ada di Dinas tersebut menghasilkan nilai yang positif. Secara keseluruhan, para staff dapat menerima persamaan gender dan mendukung adanya kepemimpinan perempuan. Di dalam penelitian ini tidak ada faktor yang menghambat.
2.	Syahrial (2010)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Kualitas Masyarakat Desa Durai Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2009	Hasil dari penelitian tersebut bahwa peran kepemimpinan telah menjalankan dengan baik sesuai dengan indikator. Sedangkan penilaian indikator tentang persoalan desa secara arif dan bijaksana, dan kemampuan kepala desa untuk memotivasi desa agar berpartisipasi dalam pembangunan dinilai kurang baik. Selain itu penilaian masyarakat terhadap pembangunan kualitas masyarakat desa adalah tidak baik dan kurang baik.
3.	Catur Puspita Sari (2014)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2014	Hasil dari penelitian tersebut bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dinilai baik dan adanya faktor pendukung maupun penghambat di dalam masyarakat sendiri. Pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat terbagi atas dua yaitu fisik dan non fisik.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Arwita Sari (2016)	Analisis Peran Bupati dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul (studi kasus pada Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015)	Hasil dari penelitian tersebut bahwa peran bupati dalam upaya tersebut sudah cukup baik, semenjak menjabat kepeduliannya terhadap permasalahan yang terjadi sudah terlihat kemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Namun beberapa catatan harus dan bisa diperbaiki, seperti upaya serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Bantul, adanya usaha untuk mengurangi tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini akan meneliti bagaimana kepemimpinan kepala desa yang berjenis kelamin perempuan yang akan diteliti.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kepemimpinan

Menurut Robbin dan Coulter (dalam Susanto, 2010) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan. Menurut Terry (dalam Sanusi, 2014) kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Sedangkan menurut Thoha (dalam Istiqomah, 2014) kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sulistyani (Dalam Susanto, 2010) kepemimpinan dapat berjalan dengan lancar jika dalam melakukan inisiasi terhadap kelompok didukung oleh kemampuan pemimpin sebagai modal utama yang berasal dari pemimpin itu sendiri dan faktor intrinsik yaitu berupa kemampuan, kesanggupan dan kepribadian.

Dari beberapa uraian di atas, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang di inginkan, di dukung oleh kemampuan pemimpin sebagai modal utama.

a. Gaya Kepemimpinan

Menurut Suradji dan Martono (2014) Gaya kepemimpinan adalah sikap perilaku pemimpin berdasarkan norma seseorang sesuai dengan nilai kepribadian yang dianut pemimpin dalam memimpin anak buah yang diharapkan dalam praktiknya dapat mempengaruhi anak buah tersebut. Gaya kepemimpinan menggambarkan totalitas perilaku pemimpin.

Gaya kepemimpinan menurut Thoha (dalam Istiqomah, 2014) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua kategori gaya yang ekstrem yaitu pertama, gaya kepemimpinan otokratis, gaya ini dipandang sebagai gaya yang di dasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis, gaya ini dikaitkan dengan

kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

b. Tipe Kepemimpinan

Adapun tipe-tipe kepemimpinan menurut Suradji dan Martono (2014) adalah sebagai berikut.

1. Kepemimpinan Otokratis

   Otokratis artinya berkuasa secara mutlak. Kepemimpinan otokratis dilakukan oleh pemimpin yang mempunyai perilaku otoriter (diktator). Biasanya pemimpin yang mempunyai perilaku ini mengutamakan kekuasaan. kepemimpinan otokratis menganggap bahwa dirinya pusat kekuasaan dan kewenangan. Komunikasi yang dilakukan secara 1 arah tanpa ada meminta kesepakatan dari anak buahnya.

2. Kepemimpinan Demokratis

   Kepemimpinan demokratis ini memusatkan pada kemanusiaan, selain itu juga menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini menganggap bahwa anak buah adalah orang yang mendukung dalam keberhasilan kepemimpinannya. Maka dari itu kepemimpinan ini menjaga hubungan baik antara atasan dengan bawahan dan mengikutsertakan bawahan untuk berpartisipasi agar aktif baik mengungguli visi misi dan tujuan.

3. Kepemimpinan *Laisses Faire*

   Kepemimpinan ini biasanya disebut dengan kepemimpinan bebas atau liberal. Sebab kepemimpinan ini memberikan kepada bawahan mengenai kebijakan secara bebas tanpa ada pengawasan yang ketat. Kepemimpinan ini memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kemampuan kepada bawahannya dan terkadang terlalu bebas.

4. Kepemimpinan Paternalistis

   Kepemimpinan ini mempunyai pendekatan bahwa kepemimpinan didasarkan kepada pemikiran maka bawahan menganggap atasan memimpin karena lebih pintar, lebih mampu dan bisa daripada bawahan. Maka dari itu bawahan menganggap harus mengikuti apa yang dilakukan dan dikehendaki oleh pimpinan. Sehingga bawahan kurang bisa berkembang ketika ada masalah kecil karena harus pimpinan yang memimpin.

5. Kepemimpinan Kharismatis

   Kepemimpinan ini dilandasi karena pemimpin mempunyai suatu daya tarik yang istimewa di dalam dirinya. Sehingga bawahan menyukai pemimpin karena ada rasa memuji dan kagum. Selain bawahan juga pemimpin lain dan masyarakat juga bisa merasakan. Biasanya kepemimpinan ini karena kepribadian, adanya budi pekerti, dan perilaku sebagai praktik pemimpin. Bisa juga dikaitkan dengan supranatural.

6. Kepemimpinan Populistis.

   ada salah satu tokoh yang menulis tentang kepemimpinan ini, yaitu Peter Worsley. Beliau merumuskan bahwa kepemimpinan Populistis adalah pemimpin yang dapat membangun solidaritas rakyat. Kemudian nilai ini diarahkan kepada nasionalisme karena nilai hidup yang dimiliki rakyat. Contoh pemimpin ini adalah Ir. Soekarno yang berjuang mempertahankan nasionalisme Indonesia dan menolak kolonialisme.

7. Kepemimpinan Militeristis

   Kepemimpinan ini umumnya keras dalam bersikap dan menerapkan disiplin ketat. Hakikatnya kepemimpinan ini merujuk kepada praktik kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini biasanya menggunakan kata perintah dan instruksi, formal, disiplin, kaku, tidak suka dikritik.

2. Pengertian Kepemimpinan Perempuan

Menurut Tead (dalam Sanusi, 2014) kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang di inginkan.

Menurut Ditaria (2016) Pemimpin perempuan bersifat demokratis, suka melibatkan orang lain untuk membuat keputusan, lebih memberikan dukungan dan memberdayakan bawahan, mengutamakan kerja sama dan mengutamakan proses ketimbang

hasil, adanya toleransi apabila anak buah mempunyai kesalahan, tidak segan memberikan informasi.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan sifat demokratis, suka melibatkan orang lain untuk membuat keputusan, lebih memberikan dukungan dan memberdayakan bawahan, mengutamakan kerja sama dan mengutamakan proses ketimbang hasil, adanya toleransi apabila anak buah mempunyai kesalahan, tidak segan memberikan informasi.

a. Cara perempuan dalam memimpin

Cara dalam memimpin menurut *The Asian Pasific American Women's Leadership Institue* (APAWLI) adalah:

a. Pengontrolan Diri

Kontrol diri menurut Thalib (2010) merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan, baik dalam diri maupun dari luar diri individu, individu yang memiliki kemampuan kontrol diri akan membuat keputusan dan mengambil langkah tindakan yang efektif untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan.

Kontrol diri menurut Rahmi (2015) adalah kemampuan untuk mengelola emosi yang bersifat destruktif (merusak). Kemampuan tersebut membantu mereka tetap berada pada jalur yang benar karena mampu menghadapi kondisi tersebut dengan

tenang dan kepala dingin meskipun di bawah tekanan dan krisis atau seorang pemimpin tidak tergoyahkan bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang menguji ketahanannya.

Menurut Averill (dalam Tholib, 2010) kemampuan kontrol diri mencakup :

1) Kemampuan mengontrol perilaku, yang dimaksud dengan mengendalikan situasi atau keadaan, moral, nilai, aturan masyarakat yang mengarah perilaku positif.
2) Kemampuan mengontrol stimulus atau rangsangan, yang dimaksud dengan disebabkan perubahan tingkah laku, hawa nafsu, perasaan yang sensitif.
3) Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian yang dimaksud mampu mengatasi beragam risiko.
4) Kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang dimaksud mengontrol emosi, perilaku direncanakan.
5) Kemampuan mengambil keputusan, yang dimaksud tegas.

b. Kemampuan Komunikasi

Menurut Ditaria (2016) Pemeliharaan hubungan baik ke luar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi, baik secara lisan, maupun secara tertulis. Komunikasi yang baik dilihat dari usaha berbaur dengan seluruh masyarakat, komunikasi secara kekeluargaan seperti pemberian perintah, teguran atau masukan,

berbagi pemikiran, kesamaan makna atas pesan yang disampaikan oleh komunikator maupun komunikannya.

Menurut Suprapto (2009) komunikasi dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan, membangun kesadaran dan mengubah perilaku, sasarannya :

1) Sasaran komunikasi yang dituju, respons yang datang tidak hanya sasaran yang dikehendaki, tetapi dari kelompok atau individu yang di luar kehendak.
2) Efek komunikasi, pesan yang disampaikan diterima oleh komunikan (penerima pesan) dilihat dari efek konsumtif yaitu langsung dapat diresapi dan diamati atau efek instrumental yaitu tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh komunikan dan tidak dapat langsung diamati oleh komunikator (penyebar pesan).

c. Visi dan mencari Inovasi

Menurut Ditaria (2016) Inovasi berkaitan dengan aktivitas penciptaan perubahan dan perbaikan. Perubahan yang juga berarti mengenalkan sesuatu yang baru untuk menuju ke suatu hal yang lebih baik. Perubahan merupakan sebuah proses yang pasti terjadi, karena untuk bisa *survive*, pemimpin harus bisa menyesuaikan (adaptif) terhadap perkembangan yang terjadi baik itu di dalam lingkungan eksternal maupun internal. Para pemimpin bertanggung jawab atas terjadinya perubahan. Mereka

memompa rasa petualangan di dalam diri orang lain, mereka mencari cara untuk bisa mengubah situasi yang sedang berlangsung secara radikal, dan secara terus menerus mereka membidik lingkungan luar untuk memperoleh ide-ide baru dan segar.

d. Empati

Menurut Rahmi (2015) Empati merupakan kepekaan terhadap berbagai sinyal emosi, merasakan emosi yang tidak tersampaikan dari orang lain. Pemimpin ini mendengarkan dengan bijak dan dapat melihat sudut pandang pihak lain. Empati membentuk pemimpin mampu bersama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang beragam.

e. Pengambilan keputusan

Menurut Rahmadi (2016) Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari alternatif secara sistematis untuk menindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

a) Intuisi, merupakan keputusan berdasarkan perasaan subjektif dari pengambil keputusan.
b) Rasional, merupakan Pengambilan keputusan bersifat objektif, logis, transparan dan konsisten karena berhubungan dengan tingkat pengetahuan seseorang dan keputusan yang

bersifat rasional banyak berkaitan dengan pertimbangan dari segi daya guna.

c) Fakta, merupakan pengambilan keputusan berdasarkan kenyataan objektif yang terjadi karena keputusan yang diambil lebih sehat, baik, dan sebaiknya di dukung dengan fakta yang memadai.

d) Wewenang, merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi dari bawahannya.

e) Pengalaman, merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan bahwa pimpinan sebelum mengambil keputusan, mengingat-ingat apakah kasus atau permasalahan sudah terjadi atau belum.

f. Dekat dengan bawahan

Menurut Ditaria (2016) Pemimpin yang dekat dengan bawahannya merupakan salah satu penunjang untuk menciptakan suasana kerja yang efektif dan kondusif guna tercapainya hasil kerja yang maksimal, karena pada hakikatnya dalam sebuah lingkup organisasi terdapat hubungan dan saling ketergantungan antar pelaku organisasi dalam melaksanakan jalannya pekerjaan. Dalam hal ini pemimpin harus bisa mengondisikan dan membawa suasana nyaman dan mampu menjaga kedekatan hubungan dengan orang sekitarnya. Proses hubungan antara seorang

pemimpin dengan bawahan tetap harus terjaga dalam pantas dan saling menghargai agar wibawa seorang pemimpin tetap terjaga.

g. Menyemangati Jiwa memberi Motivasi

Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Ana Wahyu, 2012) motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan untuk mengaktifkan, mengarahkan, menyalurkan, dan menggerakkan sikap individu untuk belajar.

3. Kepala Desa

Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa mempunyai beberapa wewenang menurut UU nomor 6 Tahun 2014 salah satunya yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten atau kota dan pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan dan diatur berdasarkan

Peraturan Pemerintah. Masa Jabatan Kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat sebanyak 3 kali berturut-turut maupun tidak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa jika ingin menjadi Kepala Desa tidak ada persyaratan yang mengatur jenis kelamin, artinya Kepala Desa boleh dipimpin baik laki-laki maupun perempuan.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atas batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

Kepemimpinan perempuan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan sifat demokratis, suka melibatkan orang lain untuk membuat keputusan, lebih memberikan dukungan dan memberdayakan bawahan, mengutamakan kerja sama dan mengutamakan proses ketimbang hasil, adanya toleransi apabila anak buah mempunyai kesalahan, tidak segan memberikan informasi. Kepemimpinan perempuan dapat dilihat dari cara perempuan dalam memimpin yaitu: pengontrolan diri, kemampuan komunikasi, visi dan mencari inovasi, empati, pengambilan keputusan, dekat dengan bawahan, dan menyemangati jiwa memberi motivasi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha bagi peneliti untuk mengukur suatu variabel yang merupakan hasil penjabaran dari sebuah konsep. Penelitian ini mencoba untuk mengukur suatu variabel dengan menggunakan indikator-indikator tertentu dengan menjabarkan kepemimpinan perempuan.

1. Pengontrolan diri.
   1) Perilaku.
   2) Mengontrol emosi.
   3) Tegas.

2. Kemampuan komunikasi.
   1) Proses komunikasi yang baik.
   2) Berbagi pemikiran.
   3) Berbaur dengan masyarakat.
   4) Memberi perintah.
   5) website.
   6) monitor.

3. Visi dan mencari Inovasi.
   1) Sistem yang baru.
   2) Mengubah situasi yang sedang berlangsung.
   3) Perkembangan.
   4) Pembaruan sistem yang ada.

4. Empati.
    1) Peka.
    2) Mendengarkan dengan bijak.
    3) Melihat sudut pandang pihak lain.
    4) Berbaur.
5. Pengambilan keputusan.
    1) Wewenang.
    2) Fakta.
    3) Rasional.
    4) Pengalaman.
6. Dekat dengan bawahan.
    1) Saling menghargai agar wibawa terjaga.
    2) Hubungan saling ketergantungan.
    3) Mampu menjaga kedekatan hubungan.
7. Menyemangati jiwa memberi motivasi.
    1) Mengarahkan.
    2) Mengaktifkan.
    3) Menggerakkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka-angka untuk ditarik kesimpulan dan pada umumnya menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami atau tentang pengaruh yang sedang bekerja. Penelitian kualitatif ini yaitu ingin melakukan penelitian secara mendalam bukan dengan hasil angka, melainkan dengan hasil dari wawancara dengan narasumber, dokumen-dokumen, catatan dan observasi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang didapatkan secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data Primer yang akan digunakan berupa wawancara dengan narasumber-narasumber baik secara tatap

muka maupun via telepon dikarenakan narasumber berhalangan adanya suatu kegiatan tertentu.

Tabel 1.3. Daftar Narasumber Penelitian

Nama Narasumber	Jabatan	Teknik Pengumpulan Data
Nur Widayati, SH	Kepala Desa	Wawancara
Ida Wulandari	Ketua PKK	Wawancara
Eko Purnomo	Kepala Urusan Perencanaan	Wawancara
Subagyo	Kepala seksi Pemerintahan	Wawancara
Dra. Sulastri	Kepala Urusan Pembangunan	Wawancara
Sukiyem	Warga dusun Demangan	Wawancara
Nurjanah	Warga dusun Sidorejo	Wawancara

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua informasi yang didapatkan tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data sekunder yang akan digunakan adalah Dokumen di mana dokumen nantinya akan diperoleh dari Kantor Desa Selomartani, Kalasan Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, adalah:

a. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian terhadap individu menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian.

b. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

   Dokumentasi yang diambil berupa catatan hasil wawancara dan foto saat wawancara berlangsung.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam kategori dan uraian dasar. Tahap-tahap dalam analisa data adalah:

1. Pengumpulan data, yaitu mencatat semua data secara nyata dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian. Reduksi nanti berbentuk menggolongkan,

mengarahkan dan dibuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil reduksi untuk hasil yang lebih akurat tentang hasil penelitian.

3. Penyajian data, yaitu sekelompok informasi yang tersusun dan dimungkinkan menarik kesimpulan dan tindakan.
4. Verifikasi atau pengambilan keputusan, ketika data telah jadi maka hal terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan keputusan, reduksi data dan penyajian data yang menjadi jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat tahap ini saling mempengaruhi. Pertama dilakukan penelitian di lapangan dengan wawancara dan observasi, setelah data terkumpul lalu data direduksi dan penyajian data. Setelah selesai, maka langkah terakhir yaitu memverifikasi atau mengambil kesimpulan.